

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asfar, Muhammad, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Asshidiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, 2012, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhari, Muhammad Tahir, 2005, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarti, Rita Triana, 2015, *Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Cahyadin, Antonius dan Donny Danardono, 2009, *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M., 2015, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin, d.k.k, 2016, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harman, Benny K., 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Kedepan*, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta.

- Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Kepaniteraan Dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Latif, Adul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Luky Sandra Amalia, d.k.k, 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2016, *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mahfud, Moh MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2013, *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta.
- Marwah, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Comlaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pasaribu, Kholilullah, 2016, *Noken Dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, Perludem, (Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi), Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat MPR, Jakarta.
- Putra, Ahimsa, Heddy Shri, 2016, *Politik Ambilvalensi*, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Raharusun, Yohanes Anton, 2009, *Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI, Telaah Yuridis Terhadap Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Konstitusi Press, Jakarta.

- Rimdan, 2012, *Kekuasaan kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Riwanto, Agus, 2016, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI “*Risalah Rapat Pleno ke-35 Panitia Ad-Hoc I Badan Pekeja MPR, 25 September 2001*”, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat ke-41 Panitia Ad-Hoc I Badan Pekeja MPR, Kamis 8 Juni 2000*, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Pleno ke-11 Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja MPR, 20 Maret 2001*, Jakarta.
- Soimin, Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sumarjono, SW. Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadi, Fadli Ahmad, 2013, *Politik Hukum, konstitusi, dan Mahkamah konstitusi Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Atriwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Uger, Robert M., 2013, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Nusa Media, Bandung.
- UNHCR, Depkeh dan HAM dan POLRI, 2002, *Instrumen Pokok Hak asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Universitas Gadjah Mada, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum, Nomor 1955/H.01.H4.FH/I/2013*.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar Dan STAIN Palangkaraya Press, Yogyakarta.

Warassihh, Esmi, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang.

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah, Jurnal)

Pranata, Andi Setyo, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Nugroho, Rahmat Muhajir, Penerapan Keadilan Substantif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Kurniawan, Lilik, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/ Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Dalam Mewujudkan Prinsip Due Proses Of Law, *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Tandiasa, Viktor Santoso, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97-XII/2013, *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950, tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara tahun 1950 yang telah dicetak ulang, disetujui seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1374)

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Noken

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 47-81/PHPU.A VII/2009, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Provinsi Papua Dengan Pemohon Elion Numberi dan Hasby Suaib.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 89/PHPU.C-VI/2009, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Partai Demokrat Yang diwakili oleh Hadi Utomo dan H. Marzuki Alie.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR Dan DPRD yang diajukan oleh Partai Bintang Reformasi yang diwakili oleh Bursah Zarnubi dan Rusman H.M. Ali.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 134/PHPU.D-VII/2009, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nabire.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Waropen.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 195/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mameramo Raya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 206/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang.

- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 76/PHPU.D-IX/2011, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nduga.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 86/Phpu.D-Ix/2011, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lani Jaya.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dogiay.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 33/PHPU.D-X/2012 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Deiyai.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 34/PHPU.D-X/2012, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 39/PHPU.D-X/2012, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 79/PHPU.D-X/2012, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 1/PHPU.D-XI/2013, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 14/PHP.D.XI/2013. DPRD/XII/2014, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua.

- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 18/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mimika.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 Yang Diajukan Oleh Partai Nasional Demokrat Dengan Diwakili Oleh Surya Dharma Paloh Dan Patrice Rio Capella.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 31/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yahukimo.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 56/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 102/PHP.BUP-XIV/2016, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dogiay.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 47/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lani Jaya.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Lani Jaya.

Kebijakan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013–
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Noken Sebagai Pengganti
Kotak Suara.

Surat Rekomendasi KPU Provinsi Papua Nomor 62/F.23/KPU.PROV.030/II/2017
Tanggal 08 Februari 2017, Tentang Penetapan Penggunaan Sistem
Noken Di Setiap Distrik, Kampung, KPPS di Kabupaten Lani Jaya,
Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiay.

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16/Kpts/KPU Prov. 030/2017
Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan
Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan
Dogiay Tahun 2017.

Surat KPU Provinsi Papua Nomor 64/F13/KPU-Prov.030/II/2017 Tentang
Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi dan Pedoman Teknis
Pemilihan Dengan Sistem Noken.

Internet

<https://www.papua.go.id/portal/public/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html>,

diakses pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, pk1 13.11.

<https://makalahkompli.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-keadilan-substantif.html>,

diakses pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, pk1. 07.23.